

## EVALUASI PROGRAM KESELAMATAN LALU LINTAS OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DALAM MENURUNKAN TINGKAT KECELAKAAN TAHUN 2024

Alkindi Batradonan Marzet<sup>1)</sup>, Aprilia Lestari<sup>2)</sup>, Eva Susanti<sup>3)</sup>, Yahnu Wiguno Sanyoto<sup>4)</sup>

<sup>1),2),3),4)</sup> Dosen Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja Jl Ratu Penghulu No.02301 Karang Sari, Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan

Email : [alkindi3093@gmail.com](mailto:alkindi3093@gmail.com)<sup>1)</sup>, [varie2104@gmail.com](mailto:varie2104@gmail.com)<sup>2)</sup>, [evaevtos@gmail.com](mailto:evaevtos@gmail.com)<sup>3)</sup>, [yahnoe@yahoo.com](mailto:yahnoe@yahoo.com)<sup>4)</sup>

### ABSTRACT

*The high number of traffic accidents in Ogan Komering Ulu Regency in 2024 encouraged the local government through the Transportation Agency to implement a traffic safety program focused on the construction and maintenance of street lights. This study aims to evaluate the effectiveness of the program using a descriptive qualitative approach with William N. Dunn's policy evaluation theory. Data were collected through interviews, observations, and documentation with informants from government, community, and academic elements. The results of the study indicate that the program has not run optimally due to budget constraints, uneven distribution of lights, and low community participation. The conclusion of this study is the need for continuous evaluation, increasing the capacity of implementers, and strengthening community collaboration so that the program runs more on target and sustainably.*

**Keywords :** *program evaluation, traffic safety, street lighting*

### I. PENDAHULUAN

Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2022 tercatat 41 kasus, meningkat menjadi 57 kasus pada 2023, dan mencapai 89 kasus pada 2024. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap keselamatan dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten OKU melalui Dinas Perhubungan mengimplementasikan dua program utama: pembangunan prasarana lampu jalan dan rehabilitasi perlengkapan jalan, sebagai upaya menurunkan angka kecelakaan. Namun, efektivitas program ini masih diragukan, mengingat tren kecelakaan justru meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara sistematis untuk menilai keberhasilan program berdasarkan enam indikator evaluasi dari William Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kesamaan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

### II. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sosial guna kepentingan masyarakat dengan berlandaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni yang pertama tingkat hidup masyarakat meningkat, kedua terjadi keadilan *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi

individual, ketiga diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan yang keempat terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Program adalah instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu, serta menghasilkan manfaat yang bisa diukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah.

Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris "*evaluation*" yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana suatu program, kebijakan, atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan di masa depan.

Evaluasi berfungsi untuk menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan mengenai kinerja suatu program atau kebijakan, dengan tujuan mengidentifikasi sejauh mana tujuan dan target yang telah dicapai. William Dunn juga mengembangkan berbagai indikator atau kriteria yang digunakan dalam proses evaluasi, antara lain Efektivitas, Efisiensi, Kesamaan, Kecukupan, Responsivitas dan Ketepatan.



Keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya, karena kecelakaan mengakibatkan kerugian terhadap keluarga korban kecelakaan. Faktor lalu lintas menyangkut besar kecilnya arus lalu lintas, kecepatan dan komposisi jenis kendaraan beragam, maka potensi terjadi kecelakaan semakin besar.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan”. Secara umum keselamatan lalu lintas sangat ditentukan oleh 3 hal yakni :

1. Pengendara Kendaraan Bermotor
2. Kendaraan yang dipakai
3. Kondisi Jalan dan Lingkungan sekitar Jalan.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci yang terdiri dari pejabat Dinas Perhubungan, masyarakat, dan akademisi, serta melalui observasi lapangan dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus evaluasi menggunakan teori William N. Dunn dengan enam indikator utama.

### IV. PEMBAHASAN

#### 1. Efektivitas

Indikator efektivitas dari program keselamatan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten OKU tahun 2024 belum tercapai secara optimal. Program pengadaan lampu jalan telah meningkatkan visibilitas dan rasa aman, namun tidak secara langsung berdampak pada penurunan angka kecelakaan. Sementara itu, program pemeliharaan menghadapi berbagai hambatan teknis dan manajerial yang menyebabkan lampu rusak tidak segera diperbaiki. Hal ini mengurangi manfaat dari program secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten OKU, meskipun penerangan jalan memberikan manfaat bagi pengguna jalan pada malam hari, faktor perilaku pengendara, kelengkapan rambu lalu lintas, dan kondisi jalan yang kurang memadai masih menjadi penyebab utama kecelakaan. Oleh karena itu, agar efektivitas meningkat, diperlukan dukungan tambahan berupa edukasi keselamatan lalu lintas,

penegakan aturan, serta sistem pemeliharaan dan pelaporan yang lebih cepat dan terstruktur.

#### 2. Efisiensi

Efisiensi program keselamatan lalu lintas melalui pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan sudah mulai diarahkan dengan pendekatan strategis, seperti penggunaan lampu LED dan tenaga surya, pemetaan wilayah prioritas, serta pembagian kerja berdasarkan area. Pada program pengadaan, efisiensi lebih terasa karena aspek teknologi dan perencanaan lokasi yang matang, serta penggunaan lampu hemat energi yang membantu menghemat anggaran listrik tahunan. Namun, efisiensi tersebut belum maksimal karena masih ada kendala utama berupa keterbatasan sumber daya manusia, sistem pelaporan yang belum efektif, dan gangguan teknis yang meningkatkan biaya operasional. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pemeliharaan lampu jalan di wilayah terpencil memerlukan biaya transportasi yang tinggi dan waktu tempuh yang panjang, sehingga mengurangi efisiensi kerja meskipun perencanaan teknis telah disusun secara matang.

Pada program pengadaan, efisiensi lebih terasa karena aspek teknologi dan perencanaan lokasi yang matang. Sedangkan dalam program pemeliharaan, efisiensi masih menjadi tantangan karena pelaksanaan yang tidak merata dan reaktif. Agar efisiensi dapat ditingkatkan, diperlukan penguatan SDM teknis, digitalisasi pelaporan, pelibatan masyarakat secara sistematis, serta monitoring berbasis data untuk menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan anggaran di masa mendatang.

#### 3. Kesamaan

Program keselamatan lalu lintas melalui pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten OKU tahun 2024 telah mulai menasar berbagai wilayah dan kelompok masyarakat, namun tingkat kesamaannya belum sepenuhnya tercapai. Wilayah perkotaan dan daerah yang mudah dijangkau mendapat manfaat lebih besar, sementara daerah terpencil masih menghadapi keterlambatan dan keterbatasan fasilitas. Hasil observasi menunjukkan adanya kesenjangan distribusi fasilitas penerangan jalan antara wilayah perkotaan seperti Baturaja Timur dan Baturaja Barat yang telah mendapatkan pemasangan lampu jalan secara merata, dan wilayah pedesaan seperti Kecamatan Ulu Ogan dan Pengandonan yang masih banyak titik gelap belum tersentuh program.

Hambatan utama berasal dari keterbatasan anggaran, sulitnya akses geografis, dan proses birokrasi yang menyulitkan aspirasi masyarakat desa untuk masuk ke penganggaran. Untuk meningkatkan kesamaan,



diperlukan strategi afirmatif seperti prioritas anggaran bagi daerah sulit, perluasan teknologi ramah akses (misalnya tenaga surya), serta sistem musrenbang yang lebih responsif terhadap kebutuhan keselamatan di pedesaan. Hal ini penting agar semua warga, tanpa memandang lokasi atau status sosial, memiliki akses yang setara terhadap fasilitas keselamatan lalu lintas.

#### 4. Kecukupan

Program pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten OKU tahun 2024 belum mencukupi untuk menjawab kebutuhan keselamatan lalu lintas secara merata di seluruh wilayah. Meskipun telah mencakup daerah strategis dan perkotaan, banyak wilayah pedesaan, terpencil, serta jalan antar kecamatan yang belum terjangkau oleh fasilitas tersebut. Penerangan jalan yang ada belum mampu menjangkau seluruh titik rawan kecelakaan, khususnya pada persimpangan jalan yang rawan konflik lalu lintas, sehingga kebutuhan keselamatan belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, keterbatasan tenaga teknis dan anggaran membuat program pemeliharaan belum menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat secara adil dan cepat. Pemasangan lampu jalan di wilayah strategis memang membantu mengurangi risiko kecelakaan, namun jumlahnya belum cukup untuk menjangkau seluruh jalan penghubung antar desa. Keterbatasan tenaga teknis dan anggaran membuat program pemeliharaan belum menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat secara adil dan cepat, bahkan beberapa lampu rusak dibiarkan hingga berbulan-bulan.

Untuk meningkatkan kecukupan, dibutuhkan perluasan cakupan wilayah program, penambahan tenaga teknis, serta penguatan sistem pelaporan dan partisipasi masyarakat. Tanpa itu, program akan terus tertinggal dari kebutuhan nyata di lapangan, dan tujuan meningkatkan keselamatan lalu lintas belum akan tercapai secara menyeluruh.

#### 5. Responsivitas

Dinas Perhubungan Kabupaten OKU cukup responsif terhadap laporan dan kebutuhan masyarakat, khususnya jika menyangkut keselamatan lalu lintas yang jelas urgensinya. Respons cepat dilakukan terutama di wilayah yang memiliki data kecelakaan atau laporan kerusakan yang masuk secara resmi.

Namun, responsivitas tersebut masih menghadapi hambatan dalam hal birokrasi, keterbatasan anggaran, dan minimnya sosialisasi mekanisme pengaduan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan warga di daerah terpencil atau yang tidak tahu cara melapor mengalami keterlambatan penanganan, yang menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan Dishub.

#### 6. Ketepatan

Program pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten OKU telah diarahkan ke titik-titik yang tepat, yaitu lokasi rawan kecelakaan berdasarkan data dan pengaduan masyarakat. Ini menunjukkan adanya ketepatan dalam perencanaan dan pemetaan masalah.

Penentuan lokasi pemasangan lampu jalan sudah mempertimbangkan titik rawan kecelakaan, namun keterbatasan peralatan dan kondisi geografis menjadi faktor penghambat realisasi di beberapa wilayah prioritas. Penentuan lokasi pemasangan umumnya sudah tepat sasaran dan pemeliharaan lampu jalan harus didasarkan pada aspek fungsional, geografis, dan sosial, serta data kecelakaan dan kebutuhan nyata, bukan hanya anggaran atau pertimbangan administratif, agar kebijakan sesuai dengan kondisi lokal.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan geografis yang membuat beberapa lokasi penting seperti daerah terpencil atau yang memiliki potensi wisata dan risiko kecelakaan tinggi seperti Ulu Ogan belum tersentuh sepenuhnya. Dalam program pemeliharaan, ketepatan juga terganggu oleh keterbatasan personel dan kurangnya sistem pelaporan cepat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketepatan, diperlukan evaluasi berkala atas lokasi prioritas, penguatan sistem pelaporan, dan penyesuaian fleksibel terhadap dinamika kebutuhan di lapangan, agar program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara akurat dan menyeluruh.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Program keselamatan lalu lintas berupa Pengadaan Lampu Jalan dan Pemeliharaan Lampu Jalan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten OKU belum menunjukkan keberhasilan optimal dalam menurunkan angka kecelakaan. Masalah utama terletak pada distribusi anggaran, pemahaman teknis, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk itu, disarankan agar Dinas Perhubungan melakukan evaluasi berkala, memperbaiki perencanaan teknis, dan meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat lokal.

Rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain: peningkatan alokasi dana, pelatihan teknis bagi pelaksana, perluasan jangkauan program ke wilayah pinggiran, serta program edukasi keselamatan lalu lintas yang melibatkan partisipasi warga secara aktif.

## DAFTAR PUSTAKA



### **Buku**

Budi Winarno. 2012 Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: MedPress Digital.

Muhadjir, N. 2000. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta: Raka Sarasin.

Dunn, W.N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (S. Wibawa, Penerjemah.) Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D. Bandung: Alfabeta.

UNDP, 2021 Public Service Delivery and Governance Reform, New York: UNDP Policy Brief.

### **Jurnal**

Firdaus, M., et al. 2024. Evaluasi Kebijakan Publik dan Kinerja Pemerintah dalam Konteks Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Curricula: Journal of Curriculum Development*, 3(1), 17-28.

Imam Suhadi, Nuril Mahda Rangkuti. 2019. Analisis Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Pada Persimpangan Dengan Metode Traffic Conflict Technique. *Jurnal Of Civil Engineering Building and Transportation*.

Jurnaluniv45sby.ac.id. 2024 Evaluasi Program Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Dewantara*, 7(2), 55-68.

Rudatin Ruktiningsih. 2017. Analisis Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Kota Semarang. *Jurnal Unika*.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Jakarta.

### **Web Page**

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2023. Statistik Transportasi Indonesia 2023. Jakarta: Kemenhub.

Wikipedia. 2023. "Evaluasi" [Online]. Dari: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Evaluasi> [Diakses: 29 April 2025]

Wikipedia. 2023. "Keselamatan Lalu Lintas" [Online]. Dari: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Keselamatan\\_lalu\\_lintas](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Keselamatan_lalu_lintas) [Diakses: 29 April 2025]

